



## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor: 884/UN37.3.1/LT/2012

Tanggal: 9 Agustus 2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Duaribu Duabelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.  
NIP : 196410271991021001  
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sesuai Keputusan Rektor Nomor: 165/P/2009 tanggal 3 Nopember 2009, yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Amir Mahmud, S.Pd., M.Si  
NIP : 197212151998021001  
Pangkat/Golru : Penata Tk. I / III-d  
Jabatan : Dosen pada FE Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 849/UN.37.3.1/KU/2012 tanggal 7 Agustus 2012:

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1. Judul Penelitian

- 1). **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai Ketua Pelaksanaan Penelitian.
- 2). Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian Terapan dengan judul: "PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA SKPD SE-JAWA TENGAH."

### Pasal. 2. Pembobotan Prestasi Penelitian

- 1) Peneliti sudah menyelesaikan pembuatan Proposal Penelitian diberi bobot Prestasi 0%.

- 2) Peneliti sudah menyerahkan Proposal dan Instrumen Penelitian yang sudah direvisi setelah dievaluasi oleh reviewer dibobot prestasi 30% dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Proposal dan Instrumen Penelitian Yang Telah Direvisi.
- 3) Peneliti sudah menyerahkan Draft Laporan Penelitian untuk dievaluasi oleh Reviewer diberi bobot 70% dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Draft Laporan Penelitian.
- 4) Peneliti menyerahkan laporan hasil penelitian yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 5 eksemplar beserta soft copynya dalam format pdf, serta artikel dan rencana luaran penelitian sesuai pasal 7 dan 11 diberi bobot 100% dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Final Penelitian.

### **Pasal 3. Cara Pembayaran**

- 1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) sebesar **Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor : 0597/023-04.2.16/13/2012, tanggal 9 Desember 2011 beserta revisinya.
- 2) Termyn 1, Peneliti diberikan dana sebesar 40% x **Rp 15.000.000,00 = Rp 6.000.000,00** apabila kontrak penelitian sudah ditanda tangani.
- 3) Termyn 2, Peneliti diberikan 70% dari nilai kontrak atau tambahan dana 30% x **Rp 15.000.000,00 = Rp 4.500.000,00**, apabila prestasi penelitian telah mencapai 30% berupa penyerahan proposal dan Instrumen penelitian yang telah disetujui reviewer.
- 4) Termyn 3, Peneliti diberikan 100% dari nilai kontrak atau tambahan dana 30% x **Rp 15.000.000,00 = Rp 4.500.000,00**, apabila prestasi penelitian telah mencapai 100% berupa penyerahan hasil penelitian yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan artikel untuk jurnal sesuai pasal 11, atau prestasi kegiatan penelitian telah mencapai minimal 70% sesuai pasal 2 ayat 3.

### **Pasal 4. Jangka waktu penelitian**

- 1) Pelaksanaan Penelitian yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dimulai sejak dikeluarkan surat perjanjian pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal 10 Desember 2012, dan pekerjaan yang dimaksud harus sudah selesai 100% sesuai dengan pasal 11.
- 2) Paling lambat tanggal 3 Desember 2012 Ketua Peneliti harus sudah menyerahkan Draft Laporan Penelitian untuk dievaluasi oleh Reviewer sebanyak 2 eksemplar.
- 3) Minggu keempat Bulan Oktober 2012, Ketua Pelaksana harus menyerahkan laporan kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 5. Sanksi dan Denda**

Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Pelaksanaan Penelitian tersebut Ketua Pelaksana belum menyerahkan laporan final, maka Ketua Pelaksana dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. Membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah biaya Pelaksanaan Penelitian yang disetujui, setinggi-tingginya 5 % (lima persen).
- b. Apabila sampai akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biaya telah berakhir belum menyerahkan hasil Pelaksanaan Penelitian, maka seluruh biaya yang belum sempat dicairkan dinyatakan

hangus, dan dana Pelaksanaan Penelitian tahap I yang telah diterima harus dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 6, Force Majeure**

- 1) Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program akibat force majeure maka sanksi yang ada pada pasal 5 dari perjanjian ini tidak akan dikenakan pada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya program.
  - b. Huru-hara atau suasana kacau balau yang mengakibatkan tidak terlaksananya program.
  - c. Situasi lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** segera memberitahu **PIHAK PERTAMA** mengenai kejadian force majeure selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** setelah situasi menjadi normal kembali.

#### **Pasal 6, Pergantian Ketua Pelaksana dan Keaslian Penelitian**

- 1) Apabila Penanggungjawab Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota.
- 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pelaksanaan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pelaksanaan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pelaksanaan Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.
- 3) Apabila ada perubahan terhadap susunan Tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7, Luaran Hasil Penelitian**

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional dan atau Teknologi Tepat Guna atau Rekayasa Sosial dan/atau Buku Ajar untuk setiap judul sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1.
- 2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, Pasal 7 ayat 2 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari Kegiatan pelaksanaan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 9, Biaya Materai dan Pajak**

Biaya materai, dan pajak (PPN dan PPh) dan lain-lain pungutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 10, Monitoring Kegiatan**

Setiap waktu **PIHAK PERTAMA** atau mereka yang ditunjuk, berhak melakukan pengawasan dan monitoring Pelaksanaan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 11. Bentuk Laporan**

- 1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%, dengan menyerahkan laporan final sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan *soft copy* dalam format pdf sebanyak 1 (satu) keping CD yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes. yang berisi:
  - a) Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian
  - b) Artikel
  - c) Lampiran-lampiran yang terkait dengan kegiatan penelitian
  - d) Menyerahkan *Log Book* yang sesuai dengan ketentuan.
- 2) Laporan Hasil tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Ukuran kertas kuarto, huruf *Times New Roman* ukuran 12, jarak 1,5 spasi.
  - b) Judul pada laporan harus sesuai dengan Surat Perjanjian
  - c) Pada cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
  - d) Dibawah bagian cover laporan ditulis :

#### **Dibiayai Oleh:**

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang  
Nomor: 0597/023-04.2.16/13/2012, tanggal 9 Desember 2011 dan Revisinya  
Sesuai Dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
Nomor: 849/UN37.3.1/KU/2012, Tanggal 07 Agustus 2012**

### **Pasal 12, Pembatalan Perjanjian**

- 1) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ternyata tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 surat Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** dengan nyata-nyata menyerahkan pelaksanaan kegiatan tersebut keseluruhannya kepada **PIHAK KETIGA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari Jabatannya atau pindah/dipindahkan ke Instansi lain sebelum proyek dinyatakan selesai.

### **Pasal 13, Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Semarang Selatan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 14, Aturan Tambahan

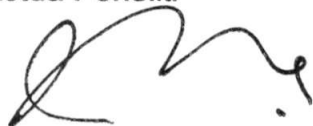
- 1) Biaya penelitian selama belum dialokasikan dalam DIPA Unnes Tahun Anggaran 2012 Revisi APBN-P maka penelitian bersifat mandiri dengan biaya mandiri.
- 2) Apabila biaya penelitian tidak teralokasikan dalam DIPA Unnes Tahun Anggaran 2012 Revisi APBN-P, maka peneliti tidak akan menuntut biaya penelitian pada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Tata cara pembayaran lebih lanjut akan diatur dalam addendum kontrak setelah DIPA Unnes Tahun Anggaran 2012 Revisi APBN-P disetujui.

#### Pasal 15, Penandatanganan Surat Perjanjian

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari ini, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut di atas rangkap 2 (dua) yang sama bunyi dan kekuatan hukumnya dengan materai lembar pertama dan kedua masing-masing Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti



Amir Mahmud, S.Pd., M.Si  
NIP: 197212151998021001



**PIHAK PERTAMA**

Sekretaris LP2M Unnes



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.  
NIP. 196410271991021001.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung G Lt. 1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon/Fax: (024) 8508087 , 8508089  
Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Email: [lp2m@unnes.ac.id](mailto:lp2m@unnes.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amir Mahmud, S.Pd., M.Si  
NIP : 197212151998021001  
Pangkat/Golru : Penata Tk. I / III-d  
Jabatan : Dosen FE Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian Terapan saya dengan judul: "PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA SKPD SE-JAWA TENGAH" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor : 0597/023-04.2.16/13/2012, tanggal 9 Desember 2011 beserta revisinya, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 884/UN37.3.1/LT/2012, tanggal 9 Agustus 2012, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 9 Agustus 2012

Yang Menyatakan,  
Ketua Peneliti

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si  
NIP: 197212151998021001

Mengetahui,  
Ketua LP2M  
Sekretaris



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.  
NIP. 196410271991021001

Program Penelitian Terapan



## LAPORAN

### PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA PPKD SE JAWA TENGAH

OLEH :

AMIR MAHMUD, S.Pd.,M.Si  
NANIK SRI UTAMININGSIH, SE, M.Si, Akt  
RETNONINGRUM HIDAYAH, SE

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2012

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul : PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGANJAWABAN SOSIAL PADA SKPD SE JAWA TENGAH
2. Bidang Penelitian : EKONOMI
3. Data Peneliti
- a. Nama Ketua : AMIR MAHMUD, S.Pd, M.Si
  - b. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
  - c. NIP : 197212151998021001
  - d. Golongan Ruang : III-d
  - e. Jabatan Fungsional : LEKTOR KEPALA
  - f. Jabatan Struktural : PEMBANTU DEKAN BIDANG UMUM DAN ADMINISTRASI
  - g. Jurusan : AKUNTANSI
  - h. Fakultas : FE
  - j. Alamat Rumah : KLIPANG PESONA ASRI III E47 SENDANG MULYO
  - k. No Telp / HP : 085290671200
4. Jumlah Anggota : 2 orang
- a. Nama Anggota I : NANIK SRI UTAMININGSIH 2
  - b. Nama Anggota II : RETNONINGRUM HIDAYAH 3
5. Lokasi Penelitian : SEMARANG
6. Lama Penelitian : 5 bulan
7. Jumlah biaya yang diusulkan : **Rp. 16.000.000,00**

Mengetahui,

Dekan FE



Semarang, 5 Desember 2012

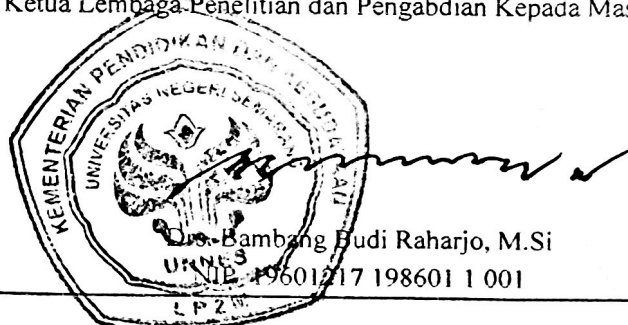
Peneliti,

AMIR MAHMUD, S.Pd, M.Si

NIP 197212151998021001

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat





## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PRAKATA .....	iii
SARI .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi dan perumusan Masalah .....	2
3. Tujuan Penelitian .....	3
4. Keluaran dan Manfaat Penelitian .....	3
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
1. Tinjauan tentang Green Accounting .....	5
2. Tinjauan tentang CSR .....	5
3. Tinjauan luas pengungkapan Akuntansi Sektor publik.....	7
4. Tinjauan tentang Pengeluaran Pembangunan .....	7

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Jenis dan sumber data .....	11
Teknik Pengambilan Sampel .....	11
Definisi Operasional .....	11
Teknik Analisa .....	12

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil Penelitian .....	13
a. Deskripsi Obyek Penelitian .....	13
b. Peran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja lingkungan .....	14
c. Proporsi Belanja lingkungan terhadap total belanja PPKD tahun 2010 .....	15
d. Proporsi Belanja lingkungan terhadap total belanja PPKD tahun 2011 .....	21
2. Pembahasan .....	24
a. Peran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja lingkungan .....	24
b. Peran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja lingkungan .....	25

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	26
5.2 Saran .....	27

DAFTAR PUSTAKA .....28

LAMPIRAN .....29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Era keterbukaan saat ini menuntut sebuah organisasi untuk senantiasa menampilkan kinerjanya secara sportif dan menganut prinsip akuntabilitas, baik organisasi public maupun organisasi private. Tuntutan kinerja perusahaan bukan hanya memiliki kinerja keuangan yang baik dan akuntabel, tetapi tuntutan sosial pun menjadi tanggung jawab perusahaan. Bahkan sejak tahun 1970 an telah terdapat kelompok konsumen yang sadar lingkungan, dan menuntut adanya manajemen sadar lingkungan dan produk yang ramah lingkungan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan brand image. Akuntansi Lingkungan telah digunakan untuk menganalisis, memanfaatkan, dan menghubungkan informasi keuangan dan non keuangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menyadari kebijakan pengelolaan lingkungan.

Akuntansi manajemen lingkungan ataupun *Green Accounting* memungkinkan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi yang berhubungan dengan lingkungan yang membantu perusahaan mengelola kinerja lingkungan dan ekonomi dalam melakukan pelaporan dan audit informasi perusahaan (Federasi Internasional Account, 2009), Sehingga perhitungan keuntungan dan kerugian dalam akuntansi seharusnya juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pelayanan publik saat ini, nampaknya pengelolaan lingkungan belum seiring dengan berkembangnya usaha dan pelayanan tersebut, dapat dilihat dari banyaknya kejadian bencana alam secara global. Di tengah berbagai terpaan krisis global saat ini, penerapan CSR sebagai sebuah standar beroperasinya perusahaan dapat menjadi salah satu jalan atau upaya untuk turut mengurangi dampak krisis global.

Organisasi sektor publik, sebagai salah satu bentuk entitas ekonomi merupakan instansi atau organisasi yang mengedepankan kepentingan public dan berasas non profit, keseluruhan kegiatannya difokuskan pada kepentingan masyarakat, untuk itu pertanggungjawaban sosialnya pun tidak lebih rendah dari perusahaan yang notabenenya merupakan perusahaan *private* yang berorientasi pada profit. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pelayanan publik saat ini, nampaknya pengelolaan lingkungan belum seiring dengan berkembangnya usaha dan pelayanan tersebut, dapat dilihat dari banyaknya kejadian bencana alam secara global. Di tengah berbagai terpaan krisis global saat ini, penerapan CSR sebagai sebuah standar beroperasinya

perusahaan dapat menjadi salah satu jalan atau upaya untuk turut mengurangi dampak krisis. Dari sisi studi akuntansi, perkembangan CSR menjadi isu yang menarik, tidak hanya pada versi pengungkapan saja, tetapi seberapa besar pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh sebuah entitas dalam satuan moneter. Persoalan problem publik seperti masalah bencana alam, kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan sebagainya selama ini dikenal sebagai domain administrasi publik.

Pemerintah sebagai salah satu sector public yang memiliki kepentingan sangat tinggi terhadap sumber daya alam dan lingkungannya, juga memiliki kewajiban melaporkan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Melalui system desentralisasi, setiap pemerintah daerah dengan perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib melaporkan laporan keuangannya kepada Departemen Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Selama ini, pelaporan keuangan yang dilakukan masih terkonsentrasi pada pelaporan realisasi anggaran, dan perolehan opini Wajar tanpa pengecualian, sebagai bukti telah dilaksanakan *good governance*, akan tetapi analisa tentang kontribusi SKPD terhadap pengembangan lingkungan belum dilakukan, padahal setiap SKPD ini memiliki pendapatan yang merupakan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam di wilayah kerjanya.

Keterkaitan antara jumlah anggaran belanja yang ditujukan untuk pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan total anggaran belanja yang diterapkan dalam satu tahun, bisa digunakan sebagai salah satu indicator pelaksanaan *Good Governance Governmen*, yang meprupakan indicator yang penting bagi penilaian kontribusi sebuah entitas dalam rangka meminimalkan krisis lingkungan. Indikator ini juga bisa menjadi sebuah acuan, mengenai kepedulian setiap pemerintah daerah terhadap pengembangan dan revitalisasi lingkungan, khususnya sumber daya alam.

## 2. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Pemerintah daerah sebagai salah satu entitas ekonomi, memiliki peran yang sangat besar dalam revitalisasi lingkungan. Pemerintah memiliki beberapa kebijakan yang dapat mengikat berbagai institusi untuk ikut serta dalam melaksanakan *green accounting* atau akuntansi lingkungan. Sebagai salah satu entitas akuntansi, maka pemerintah daerah melalui SKPD memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya. Selama ini riset yang telah banyak dilakukan masih berkisar pada sisi kepatuhan entitas terhadap kewajiban melaporkan keuangannya, belum menyentuh pada substansi apakah entitas ekonomi ini telah melaksanakan akuntansi lingkungan atau belum.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pemeliharaan lingkungan, sangat tergantung pada anggaran pendapatannya. Salah satu komponen pendapatan, yang dapat digunakan untuk belanja langsung adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan atas hasil eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayahnya yang dimasukkan ke dalam komponen PAD, sehingga secara normative, pemerintah daerah ini memiliki kewajiban untuk melakukan pengeluaran bagi revitalisasi lingkungan. Besarnya pengeluaran pemerintah untuk fungsi pemeliharaan lingkungan merupakan bentuk lain dari pertanggungjawaban pemerintah, dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilaporkan dalam laporan keuangannya.

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana urgensi pemetaan terhadap rasio anggaran pengeluaran untuk revitalisasi lingkungan terhadap pendapatan asli daerah?
- b. Bagaimana urgensi pemetaan anggaran pengeluaran untuk revitalisasi lingkungan terhadap total belanja daerah berdasar fungsinya?

### **3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang:

- a. Pemetaan terhadap rasio anggaran pengeluaran untuk revitalisasi lingkungan terhadap pendapatan asli daerah?
- b. Pemetaan terhadap rasio anggaran pengeluaran untuk revitalisasi lingkungan terhadap terhadap total belanja daerah berdasar fungsinya

### **4. KELUARAN MANFAAT PENELITIAN**

Output yang diharapkan dari penelitian ini ada dua macam yaitu, **pertama** adalah informasi mengenai proporsi atau kontribusi pemerintah terhadap pelaksanaan green

accounting melalui rasio pengeluaran untuk lingkungan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan rasio anggaran pemerintah untuk revitalisasi lingkungan terhadap total belanja berdasar fungsi. Selain itu output yang **kedua** adalah artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi berskala nasional.

## BAB II LANDASAN TEORI

### **a. Tinjauan tentang *Green Accounting***

*Green accounting* adalah jenis akuntansi lingkungan yang menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi atau suatu hasil keuangan usaha, *Green Accounting* menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi lingkungan berkaitan dengan dampak lingkungan sebuah bisnis, akuntansi lingkungan nasional berusaha untuk mencapai yang sama pada tingkat-negara.

Aspek-aspek yang menjadi bidang garap akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif aktifitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktek akuntansi konvensional.
- 2) Identifikasi, mencari dan memeriksa persoalan bidang garap akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan alternatif solusinya.
- 3) Melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional.
- 4) Pengembangan format baru sistem akuntansi keuangan dan nonkeuangan, sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan.
- 5) Identifikasi biaya-biaya (*cost*) dan manfaat berupa pendapatan (*revenue*) apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dari berbagai program perbaikan lingkungan.
- 6) Pengembangan format kerja, penilaian dan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan.
- 7) Upaya perusahaan yang berkesinambungan, akuntansi kewajiban, resiko, investasi biaya terhadap energi, limbah dan perlindungan lingkungan.
- 8) Pengembangan teknik-teknik akuntansi pada aktiva, kewajiban dan biaya dalam konteks non keuangan khususnya ekologi.

Dalam perkembangannya *green accounting*, diperluas dengan mulai diberlakukannya *Corporate Social Responsibility* yang didalamnya juga memuat tentang indeks kinerja lingkungan yang telah dilaksanakan oleh corporate tersebut.

### **b. Tinjauan tentang *Corporate Social Responsibility***

Pada dasarnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang berkembang sebagai wujud dari sebuah *good corporate governance*. Pada sisi ini, CSR dilihat sebagai



aplikasi dari keberadaan korporat sebagai salah satu elemen sosial (*corporate citizenship*) yang merupakan bagian dari etika bisnis. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR mengacu pada konsep yang lebih luas dan global. *Corporate social Responsibility / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)* merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan (Budimanta, 2002).

ISO 26000 juga mengungkapkan hal yang senada, bahwa tanggungjawab sosial (*social responsibility*) menjadi tanggungjawab semua organisasi : pemerintah, perusahaan dan organisasi sipil. Definisi kerja *Social Responsibility* menurut ISO 26000 *Working Group on Social Responsibility*, Sydney, February 2007 (Paul Hohnen, 2007) adalah tanggungjawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan beretika serta konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat ; dengan mempertimbangkan harapan stakeholder; sesuai dengan hukum dan norma perilaku internasional; dan terintegrasi ke seluruh organisasi (*Social responsibility (is the) responsibility of an organisation for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organisation* ).

Lebih jauh penerapan CSR tidak hanya didasarkan pada jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat, tetapi ukuran kepedulian terhadap masyarakat juga di ukur dengan menggunakan seberapa besar jumlah nominal yang telah dikeluarkan oleh sebuah entitas. Bagi pemerintah daerah perwujudan CSR dapat di indentifikasi melalui komponen-komponen belanja berdasar fungsi. Menurut Permen no 37 tahun 2012 setiap SKPD wajib untuk melaporkan anggaran dan realisasi berdasar fungsi yang meliputi belanja untuk fungsi ekonomi, kesehatan, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, pelayanan umum, perlindungan, pendidikan social, perumahan dan fasilitas umum.

Berdasarkan pembagian biaya berdasar fungsi, dapat di tarik kesimpulan sementara bahwa semua indicator CSR telah terpenuhi, akan tetapi seberapa besar kontribusi dari setiap aspek fungsi tersebut, belum terdapat parameter yang tegas.

**c. Tinjauan tentang Luas Pengungkapan (*Disclosure*) Akuntansi Sektor Publik**

Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (*disclosure*) dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diparktikkan secara konsisten (Mardiasmo : 2002).

Instansi Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan
2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.
3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.
4. Deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan Aktivitas.
5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non operasi.
6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai asset modal dan untuk jangka panjang.

Dalam penerapan *green accounting*, maka luas pengungkapan yang dimaksudkan lebih didasarkan pada seberapa taat SKPD mempublikasikan belanja yang telah dilakukan berdasar fungsi, tidak hanya pengungkapan pada belanja langsung atau tidak langsung saja.

**d. Tinjauan tentang Pengeluaran pembangunan**

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijaksanaan

fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah.

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka masih diperlukan adanya pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut *GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001*, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budget*, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi. (Nota Keuangan dan RAPBN, 2005).

Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru, maka belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*unified budget*).

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam belanja tersebut antara lain : (Suminto, 2004)

1. Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara
2. Demikian juga dengan belanja barang yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.
3. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal aset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya nonfisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.
4. Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta.
5. Sementara itu, selama ini ada jenis subsidi yang sebetulnya tidak ada unsur subsidinya, maka belanja tersebut akan dikelompokkan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.
6. Sementara itu, belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Tabel 2.1

Konvensi Belanja Negara menurut jenis belanja dalam I-Account

Format lama	Format Baru
A. Pendapatan Negara dan Hibah	A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri	I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan	1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah	II. Penerimaan Hibah
B. Belanja Negara	B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat	I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin	1. Belanja Pegawai
a. Belanja Pegawai	2. Belanja Barang
b. Belanja Barang	3. Belanja Modal
c. Pembayaran Bunga utang	4. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi	5. Subsidi
e. Pengeluaran Rutin Lainnya	6. Belanja Hibah
2. Pengeluaran Pembangunan	7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain	
II. Belanja untuk Daerah	ii. Belanja untuk Daerah
1. Dana Perimbangan	1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
C. Keseimbangan Primer	C. Keseimbangan Primer
D. Surplus / Defisit Anggaran	D. Surplus / Defisit Anggaran
E. Pembiayaan	E. Pembiayaan

## BAB III METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data diperoleh dari publikasi seluruh PPKD pada [www. Dpjm.depkeu.go.id](http://www.Dpjm.depkeu.go.id) serta diperoleh dari Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

### 2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh PPKD yang ada di Provinsi Jawa Tengah, berjumlah 35 PPKD. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive dengan kategori sebagai berikut:

- a. PPKD yang mempublikasikan laporan realisasi anggaran (LRA) selama tahun 2010 – 2011
- b. PPKD yang mempublikasikan APBD selama kurun waktu 2010 -2011.
- c. PPKD yang mempublikasikan belanja berdasarkan fungsi untuk kurun waktu 2010 - 2011

Berdasarkan kriteria tersebut dapat diperoleh 35 PPKD di tahun 2010 dan 34 PPKD di tahun 2011

### 3. Definisi Operasional

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

#### a. Total Belanja berdasar fungsi

Merupakan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi belanja fungsi ekonomi, kesehatan, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, pelayanan umum, perlindungan, pendidikan sosial, perumahan dan fasilitas umum

#### b. Anggaran Belanja untuk Lingkungan

Merupakan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pengelolaan dan revitalisasi lingkungan sumber daya alam diwilayahnya.

#### c. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan total pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah

#### 4. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode statistik deskriptif , yaitu suatu metode penelitian yang berupaya membuat deskripsi, dengan menggunakan berbagai ukuran tendensi sentral. Analisis data dilaksanakan sejak pengumpulan data dilaksanakan sampai penulisan berakhir, informasi dan data yang berhasil dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan institusinya. Selanjutnya dilakukan *Open coding*, pada tahap ini peneliti berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya variasi data yang terkait dengan objek penelitian. *Open coding* meliputi proses merinci, memeriksa, membandingkan, dan mengkonseptualisasikan data, serta mengkatagorikan data. Selanjutnya *Axial coding*, pada tahap ini hasil yang diperoleh dari *open coding* diorganisir kembali berdasarkan kategori. Pada tahap ini dilakukakan analisis hubungan antara kategori untuk mendapatkan gambaran utuh tentang sebuah kejadian. Yang terakhir *Selective coding*, pada tahap ini data disesuaikan lagi relevansinya dengan objek penelitian yang kemudian memaknai data yang diperoleh.

BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN

I. HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian meliputi seluruh PPKD di Jawa Tengah yang telah mempublikasikan laporan realisasi anggaran selama tahun 2010 -2011. Berdasarkan penelusuran data, diperoleh 35 PPKD di tahun 2010 dan 34 PPKD di tahun 2011.

Berikut ini adalah 35 PPKD yang telah mempublikasikan LRA di tahun 2010.

TABEL 1. DAFTAR PPKD SE JAWA TENGAH

PPKD			
NO	KABUPATEN/KOTA	NO	KABUPATEN/KOTA
1	Kab. Banjarnegara	18	Kab. Pekalongan
2	Kab. Banyumas	19	Kab. Pemalang
3	Kab. Batang	20	Kab. Purbalingga
4	Kab. Blora	21	Kab. Purworejo
5	Kab. Boyolali	22	Kab. Rembang
6	Kab. Brebes	23	Kab. Semarang
7	Kab. Cilacap	24	Kab. Sragen
8	Kab. Demak	25	Kab. Sukoharjo
9	Kab. Grobogan	26	Kab. Tegal
10	Kab. Jepara	27	Kab. Temanggung
11	Kab. Karanganyar	28	Kab. Wonogiri
12	Kab. Kebumen	29	Kab. Wonosobo
13	Kab. Kendal	30	Kota Magelang
14	Kab. Klaten	31	Kota Pekalongan
15	Kab. Kudus	32	Kota Salatiga
16	Kab. Magelang	33	Kota Semarang
17	Kab. Pati	34	Kota Surakarta
		35	Kota Tegal

Sumber: Pemerintah Prop. Jawa Tengah

Untuk tahun 2011, terdapat satu PPKD yang tidak mempublikasikan LRA yaitu Kota Magelang. Sehingga untuk kepentingan pengolahan data di tahun 2011 hanya melibatkan 34 PPKD.

Pengolahan statistic deskriptif terhadap 69 data menunjukkan sebagai berikut dalam table 2.



Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
ttl.belanja	69	1.0160	999.0540	4.815387E2	400.2336531	1.602E5
blj.lingk	69	2.5950	83.7440	1.107174E1	15.1455418	229.387
prop.blj	69	.002746	5.407858E1	4.78361766E0	1.054825630E1	111.266
pad	69	42.3950	447.0320	9.282403E1	59.3962909	3.528E3
prop.blj.pad	69	.0303	.3281	.103240	.0697998	.005
Valid N (listwise)	69					

Sumber: Data primer yang di olah 2012

Total anggaran belanja berdasar fungsi pada PPKD di Jawa Tengah memiliki rata-rata 4,8 trilyun, dengan standar deviasi 1,6 trilyun, angka ini menunjukkan bahwa variasi atas total anggaran belanja antara 69 sampel tidak mengalami perbedaan yang besar. Sedangkan untuk anggaran belanja lingkungan, dengan varian 229,387 trilyun menunjukkan variasi yang cukup besar pada masing-masing sampel.

#### B. PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA UNTUK LINGKUNGAN

Rasio belanja untuk lingkungan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap program kebijakan pengelolaan dan revitalisasi lingkungan. Untuk tahun 2010 pendapatan asli daerah terbesar di peroleh Kota Semarang sebesar Rp. 314.653.496.600, sedangkan kota Pekalongan memiliki PAD yang terkecil sebesar Rp. 42.395.561.052. Rata-rata untuk ke 35 PPKD di Jawa Tengah memiliki angka PAD sebesar Rp. 83.436.188.539. Variasi cukup besar terjadi pada data di tahun 2010, utamanya disebabkan karena tingginya PAD untuk 2 PPKD yaitu Kota Semarang dan Surakarta.

Berdasarkan perhitungan rasio anggaran belanja terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai terendah untuk tahun 2010 sebesar 0,0353 dan nilai tertinggi sebesar 0,276. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa mayoritas 23 PPKD memiliki rasio berada pada range yang terkecil yaitu 0,035313 - 0,115597, 6 PPKD ada di range yang menengah, serta 6 PPKD berada pada range tertinggi di angka 0,195883 - 0,276166.

TABEL 3. RASIO BELANJA LINGKUNGAN TERHADAP PAD  
TAHUN 2010

NO	KOTA/KABUPATEN	PAD (dalam juta)	RASIO BJ LINGK. THD PAD
1	Kab. Banjarnegara	61741,597	0,052
2	Kab. Banyumas	146862,9918	0,086
3	Kab. Batang	50528,53985	0,225
4	Kab. Blora	56500	0,049
5	Kab. Boyolali	79625,59	0,051
6	Kab. Brebes	74873,526	0,147
7	Kab. Cilacap	143945,306	0,225
8	Kab. Demak	57821,547	0,075
9	Kab. Grobogan	66800,673	0,078
10	Kab. Jepara	76832,316	0,068
11	Kab. Karanganyar	78436,531	0,121
12	Kab. Kebumen	60148,533	0,047
13	Kab. Kendal	84442,08514	0,035
14	Kab. Klaten	61743,89943	0,131
15	Kab. Kudus	92241,864	0,251
16	Kab. Magelang	74129,81684	0,135
17	Kab. Pati	99478,926	0,053
18	Kab. Pekalongan	73663,46725	0,045
19	Kab. Pemasang	70610,736	0,071
20	Kab. Purbalingga	82383,623	0,058
21	Kab. Purworejo	66325,41277	0,052
22	Kab. Rembang	78227,428	0,047
23	Kab. Semarang	103084,175	0,052
24	Kab. Sragen	80619,139	0,160
25	Kab. Sukoharjo	63065,32	0,052
26	Kab. Tegal	77683,104	0,101
27	Kab. Temanggung	56931,55831	0,088
28	Kab. Wonogiri	65907,726	0,067
29	Kab. Wonosobo	63597,32498	0,075
30	Kota Magelang	53469,958	0,262
31	Kota Pekalongan	42395,56105	0,148
32	Kota Salatiga	52284,327	0,067
33	Kota Semarang	314653,4966	0,244
34	Kota Surakarta	114429,3578	0,276
35	Kota Tegal	94781,142	0,061

Sumber: data primer yang di olah 2012

Untuk tahun 2011, berdasarkan pengolahan data dapat diamati bahwa pada 34 PPKD yang telah mempublikasikan laporan keuangannya menunjukkan bahwa terdapat banyak pergeseran dengan kondisi di tahun 2010. Nilai minimum untuk rasio

anggaran belanja lingkungan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan sebesar 0,0303 dan nilai maksimum sebesar 0,3281. Secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah anggaran biaya lingkungan yang ditetapkan oleh 34 PPKD. Dari perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat 25 PPKD yang memiliki rasio sebesar 0,0303 – 0,1296; 8 PPKD memiliki rasio di antara range 0,1297 – 0,2289 serta 1 PPKD memiliki rasio di antara 0,2290 – 0,3281.

Perubahan PAD yang cukup besar terlihat pada kota Surakarta, yang memiliki selisih sebesar 20 M dari tahun 2010 – 2011. Demikian juga untuk besarnya anggaran belanja untuk lingkungan menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki anggaran yang paling tinggi untuk kebutuhan pengelolaan dan revitalisasi lingkungan. Berdasarkan data juga dapat diketahui bahwa kota Semarang memiliki PAD yang paling besar selama 2 tahun, jika di bandingkan dengan seluruh PPKD yang menjadi sampel.

TABEL 4 . RASIO BELANJA LINGKUNGAN TERHADAP PAD  
TAHUN 2011

NO	KOTA/KABUPATEN	PAD (dalam juta)	RASIO BLJ LINGK. THD PAD
1	Kab. Banjarnegara	63080,232	0,0612
2	Kab. Banyumas	192767,9817	0,1314
3	Kab. Batang	57637,05621	0,2278
4	Kab. Blora	58400	0,0485
5	Kab. Boyolali	88572,52	0,0511
6	Kab. Brebes	87797,134	0,0762
7	Kab. Cilacap	175758,884	0,1785
8	Kab. Demak	68555,957	0,0563
9	Kab. Grobogan	84349,35473	0,0533
10	Kab. Jepara	98041,215	0,0782
11	Kab. Karanganyar	88251,346	0,1332
12	Kab. Kebumen	70892,281	0,0751
13	Kab. Kendal	88115,98094	0,0303
14	Kab. Klaten	71580,476	0,2151
15	Kab. Kudus	114232,379	0,1807
16	Kab. Magelang	90279,56587	0,0468
17	Kab. Pati	115201,507	0,0397
18	Kab. Pekalongan	78217,58033	0,0370
19	Kab. Pemasang	77849,376	0,0685
20	Kab. Purbalingga	91721,635	0,0654
21	Kab. Purworejo	77111,20311	0,0337
22	Kab. Rembang	83354,852	0,0485
23	Kab. Semarang	139414,942	0,1309
24	Kab. Sragen	96723,672	0,1148
25	Kab. Sukoharjo	89282,964	0,0404
26	Kab. Tegal	88249,591	0,0590
27	Kab. Temanggung	62184,04465	0,0871
28	Kab. Wonogiri	69959,94838	0,1144
29	Kab. Wonosobo	61318,50572	0,1017
30	Kota Pekalongan	56990,82979	0,1278
31	Kota Salatiga	61746,853	0,0675
32	Kota Semarang	447032,951	0,1873
33	Kota Surakarta	176176,06	0,3281
34	Kota Tegal	113778,733	0,0716

Sumber: data primer yang di olah 2012

### C. PROPORSI BELANJA UNTUK LINGKUNGAN TERHADAP TOTAL BELANJA PPKD TAHUN 2010

Rasio besarya anggaran belanja lingkungan terhadap total belanja selama tahun 2010 dapat dikategorikan menjadi 5 interval, sebagai berikut:

TABEL 5  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 TERHADAP TOTAL ANGGARAN  
 TAHUN 2010

NO	INTERVAL	JUMLAH
1	0,285 - 1,107	25
2	1,108 - 1,972	5
3	1,973 - 2,836	2
4	2,837 - 3,701	1
5	3,702 - 4,566	2
	TOTAL	35

Sumber: data primer yang di olah 2012

Nilai minimum untuk rasio ini sebesar 0,285 dan maksimum sebesar 4,566. Rata-rata untuk rasio ini sebesar 0,011. Berdasarkan table 6, dapat dilihat bahwa untuk kategori 1, PPKD yang minimal proporsinya dalam mengeluarkan anggaran untuk lingkungan adalah PPKD Kota Kebumen, dan yang tertinggi dalam kategori ini adalah PPKD Kabupaten Banyumas. Kota Kebumen memiliki rasio belanja untuk lingkungan cukup rendah, karena diduga kota ini tidak memiliki banyak industry yang bergerak di manufacture ataupun pada industry pertambangan, berdasarkan data situs kabupaten Banyumas, sumbangan industry untuk PDRB hanya di kisaran 17%, hal ini disebabkan karena industry yang berada di kabupaten tersebut masih berskala UMK ataupun UMKM.

TABEL 6  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 0,242- 1,107  
 TAHUN 2010

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kab. Kebumen	0,285%
2	Kab. Blora	0,325%
3	Kab. Kendal	0,360%
4	Kab. Sukoharjo	0,418%
5	Kab. Boyolali	0,419%
6	Kab. Banjarnegara	0,429%
7	Kab. Purworejo	0,446%
8	Kab. Wonogiri	0,450%
9	Kab. Pekalongan	0,470%
10	Kab. Pati	0,515%
11	Kab. Demak	0,535%
12	Kab. Pemalang	0,570%
13	Kab. Rembang	0,578%
14	Kab. Grobogan	0,598%
15	Kab. Jepara	0,642%
16	Kab. Purbalingga	0,670%
17	Kab. Semarang	0,694%
18	Kab. Wonosobo	0,705%
19	Kab. Temanggung	0,777%
20	Kab. Klaten	0,788%
21	Kab. Tegal	0,849%
22	Kota Salatiga	0,872%
23	Kab. Brebes	0,903%
24	Kab. Magelang	0,981%
25	Kab. Banyumas	0,011252875

Sumber: data primer yang di olah 2012

Hasil pengolahan data yang cukup mencengangkan adalah PPKD Kab. Blora , yang menempati tempat kedua terminim dalam menempatkan anggaran belanja untuk lingkungan, padahal dalam kabupaten ini masih terdapat perusahaan pengelolaan pertambangan. Menurut data dalam “Blora dalam Angka” besarnya kontribusi industry terhadap PDRB hanya pada range 10% - 20%. Hal ini, bisa dimaklumi karena Kabupaten Blora lebih banyak memiliki UKM atau UMKM yang bergerak di sector pertanian, bukan industry produk missal

TABEL 7  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 1,108 - 1,972  
 TAHUN 2010

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kab. Batang	1,89%
2	Kab. Karanganyar	1,19%
3	Kab. Sragen	1,50%
4	Kota Pekalongan	1,52%
5	Kota Tegal	1,28%

Sumber: data primer yang di olah 2012

Untuk kategori kedua menempatkan kabupaten Batang sebagai kota dengan nilai proporsi terendah dan kota Tegal sebagai PPKD yang memiliki nilai proporsi 1,28 %. Berdasarkan data di atas, terdapat hal yang mengindikasikan kurangnya belanja untuk lingkungan pada kota Pekalongan, jika dikaitkan dengan kondisi kota Pekalongan yang didominasi oleh perusahaan Batik. Hal ini memberikan fenomena bahwa kesadaran dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan dan revitalisasinya tidak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya dari industry tersebut.

TABEL.8  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 1,973 -2,836  
 TAHUN 2010

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kab. Kudus	2,531%
2	Kab. Cilacap	2,619%

Sumber: data primer yang di olah 2012

Menurut table 8, kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap memiliki proporsi anggaran yang cukup tinggi untuk biaya pengelolaan lingkungan dan revitalisasi lingkungan. Hal ini sesuai dengan karakteristik industry yang ada di daerah tersebut, di mana banyak industry yang memberikan kontribusi yang besar (di atas 30%) terhadap PDRB masing-masing daerah.

TABEL.9  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 2,837 - 3,701  
 TAHUN 2010

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kota Magelang	3,366%

Sumber: data primer yang di olah 2012

TABEL.10  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 3,702 -4,566  
 TAHUN 2010

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kota Surakarta	3,770%
2	Kota Semarang	4,566%

Sumber: data primer yang di olah 2012

Berdasarkan tabel 10 Kota Surakarta dan Kota Semarang merupakan PPKD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepeduliannya dalam pengelolaan lingkungan dan revitalisasi lingkungan. Hal ini sesuai dengan kondisi industri di dua kota tersebut. Untuk Kota Surakarta, berdasar BPS menunjukkan bahwa jumlah industri besar dan sedang tahun 2010 sebanyak 215 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 16.585, sedangkan untuk industri kecil sebanyak 15 perusahaan.

#### D. PROPORSI BELANJA UNTUK LINGKUNGAN TERHADAP TOTAL BELANJA PPKD TAHUN 2011

Proporsi belanja untuk lingkungan terhadap total belanja PPKD tahun 2011 secara keseluruhan mengalami berbagai perubahan. Nilai proporsi terendah ada pada angka 0,217 dan tertinggi ada pada angka 5,407

TABEL 11  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 TERHADAP TOTAL ANGGARAN  
 TAHUN 2011

NO	INTERVAL	JUMLAH
1	0,217 - 1,255	24
2	1,256 - 2,293	8
3	2,294 - 3,331	0
4	3,332 - 4,369	1
5	4,37 - 5,407	1
TOTAL		34



Sumber: data primer yang di olah 2012

Berdasarkan table 12 dapat diketahui bahwa PPKD yang memiliki nilai terendah di tahun 2011 adalah Kabupaten Kendal, semula di tahun 2010 adalah kabupaten Banyumas. Saat ini kabupaten Banyumas telah bergeser pada kategori yang kedua, perubahan ini disebabkan naiknya jumlah anggaran untuk biaya lingkungan, sedangkan total belanja tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Beberapa kabupaten dan kota masih tetap menempati pada kategori 1, seperti kabupaten Boyolali, Banjarnegara, Blora dan 12 PPKD yang lain, hal ini disebabkan karena perubahan belanja untuk lingkungan memiliki angka yang hampir sama dengan perubahan total belanja, sehingga besarnya perubahan belanja tidak mampu untuk memperbesar proporsi kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan dan revitalisasi lingkungan.

TABEL. 12  
PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
PADA INTERVAL 0,217 - 1,255  
TAHUN 2011

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kab. Kendal	0,263%
2	Kab. Purworejo	0,275%
3	Kab. Blora	0,276%
4	Kab. Pekalongan	0,322%
5	Kab. Magelang	0,362%
6	Kab. Demak	0,371%
7	Kab. Banjarnegara	0,377%
8	Kab. Grobogan	0,390%
9	Kab. Pati	0,392%
10	Kab. Sukoharjo	0,393%
11	Kab. Boyolali	0,410%
12	Kab. Tegal	0,461%
13	Kab. Kebumen	0,461%
14	Kab. Brebes	0,468%
15	Kab. Rembang	0,505%
16	Kab. Pemasang	0,538%
17	Kab. Purbalingga	0,672%
18	Kab. Wonosobo	0,698%
19	Kab. Wonogiri	0,715%
20	Kab. Jepara	0,742%
21	Kab. Temanggung	0,745%
22	Kota Salatiga	0,873%
23	Kab. Sragen	1,063%
24	Kab. Klaten	0,011847164

Sumber: data primer yang di olah 2012

Untuk kategori yang kedua dengan jumlah proporsi sebesar 1.125 – 2.293 menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki kontribusi yang tertinggi dalam range ini, data di BPS menunjukkan bahwa Perusahaan Migas memiliki kontribusi yang besar dalam menyumbangkan PAD di kota Cilacap.

TABEL. 13  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 1,256 - 2,293  
 TAHUN 2011

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kab. Karanganyar	1,305%
2	Kota Pekalongan	1,534%
3	Kota Tegal	1,572%
4	Kab. Banyumas	1,654%
5	Kab. Batang	1,708%
6	Kab. Semarang	1,935%
7	Kab. Kudus	2,125%
8	Kab. Cilacap	2,315%

Sumber: data primer yang di olah 2012

TABEL. 14  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 3,332 - 4,369  
 TAHUN 2011

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kota Semarang	4,143%

Sumber: data primer yang di olah 2012

TABEL. 15  
 PROPORSI ANGGARAN LINGKUNGAN  
 PADA INTERVAL 4,370 - 5,407  
 TAHUN 2011

NO	KOTA	PROPORSI
1	Kota Surakarta	5,407%

Sumber: data primer yang di olah 2012

Berdasarkan table 14 dan 15, terdapat perubahan yang cukup signifikan, yang semula kota Semarang memiliki kategori yang sama dengan kota Surakarta untuk tahun 2010, tetapi untuk tahun 2012 ternyata Kota Surakarta memiliki perubahan proporsi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena penambahan angka anggaran belanja untuk lingkungan jauh lebih besar dari perubahan total anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pertambahan proporsi

Untuk kota Surakarta menunjukkan nilai 1,637% sedangkan kota Semarang justru mengalami penurunan sebesar -0,423%

## 2. PEMBAHASAN

### A. PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA UNTUK LINGKUNGAN

Berdasarkan fenomena yang ada dalam hasil penelitian, dapat dilihat bahwa beberapa kota atau kabupaten yang merupakan PPKD memiliki fenomena, bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin besar anggaran pengelolaan lingkungan dan revitalisasi lingkungan. Hal ini disebabkan dalam komponen perhitungan PAD termasuk pendapatan dari pajak badan atau industry serta pembagian hasil kekayaan alam.

Semakin besar proporsi PAD yang diberikan untuk anggaran biaya lingkungan dan revitalisasi lingkungan menunjukkan bahwa semakin besar itikad atau kepedulian PPKD sebagai pengelola anggaran untuk ikut melaksanakan *Green Accounting*.

Semakin besar kontribusi PPKD dalam melaksanakan *Green Accounting* maka PPKD ini akan memiliki value added yang lebih, karena telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil pemetaan, menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki kepedulian yang sangat besar dibandingkan dengan Kota Semarang, dengan mengingat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah kota Semarang dan Kota Surakarta. Kota Semarang memiliki PAD yang lebih besar dari kota Surakarta, dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah industry yang lebih besar pula. Berdasarkan kondisi APBD kota Surakarta di tahun 2010 menunjukkan bahwa sumbangan PAD terbesar bagi kota Surakarta berasal dari pajak daerah 54.423.668.000, jumlah ini memiliki proporsi 0,475 dari pendapatan asli daerah. Kondisi ini relative hampir sama dengan kota Semarang di tahun 2010 yang menunjukkan sumber terbesar dari penerimaan PAD berasal dari pajak daerah, dengan proporsi 0,516. Sehingga berdasarkan kesamaan proporsi, sudah semestinya kota Semarang memiliki kepedulian yang setingkat dengan kota Surakarta, akan tetapi hasil empiris ini menunjukkan realita bahwa kepedulian pemerintah kota Semarang terhadap perwujudan *green accounting* belum optimal.

Di tahun 2011 Kabupaten Kendal memiliki kontribusi yang sangat minim terhadap pengelolaan lingkungan dan revitalisasi, ini juga disebabkan karena jumlah PAD kabupaten ini relative kecil, dan karakteristiknya yang merupakan daerah pinggir dari kota Semarang, sehingga laju perekonomian lebih di dominasi oleh kota Semarang. Secara geografis, kota Kendal hanya sebagai daerah transit saja, tidak memiliki cirri khas yang dominan, untuk menarik para investor. Kondisi geografis

yang kurang menguntungkan dengan jumlah industry hulu yang relative kecil membuat kota ini memiliki PAD yang relative rendah. Industri terbesar di kota Kendal didominasi industry pengolahan yang relative kecil. Jumlah penduduk yang kecil dengan tingkat pendidikan yang relative rendah, juga menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung untuk melaksanakan proses *green accounting*. Data PDRB kota Kendal seperti dalam tabel di bawah ini, juga memberikan ilustrasi bahwa jumlah industry pertambangan sangat sedikit berkontribusi terhadap PDRB, hanya berada 1% dari seluruh PDRB. Sehi

**Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah ( Harga Konstant )**

Sektor	Tahun									
	2010		2009		2008		2007		2006	
	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%
Pertanian	1.257.187	23,31	127.019	3,07	1.124.043	23,16	1.086.656	23,50	1.079.409	24,35
Pertambangan	53.783	1,00	53.783	1,30	49.920	1,03	44.543	0,96	42.348	0,96
Industri Pengeolahan	2.152.290	39,91	2.152.290	51,99	1.959.314	40,37	1.861.210	40,25	1.756.427	39,61
Listrik dan Air Bersih	61.851	1,15	58.547	1,41	57.989	1,19	56.192	1,22	48.121	1,09
Bangunan	159.796	2,96	151.985	3,67	139.958	2,88	129.342	2,80	128.522	2,90
Perdagangan, Hotel, Restoran	980.811	18,19	915.639	22,12	877.482	18,08	846.064	18,30	809.635	18,26
Angkutan/Komunikasi	146.336	2,71	134.412	3,25	127.687	2,63	117.184	2,53	106.326	2,40
Bank/Keu/Perum	146.036	2,71	137.501	3,32	127.187	2,62	117.829	2,55	112.158	2,53
Jasa	434.876	8,06	408.594	9,87	389.877	8,03	364.558	7,88	350.855	7,91
<b>Total</b>	<b>5.392.966</b>	<b>100</b>	<b>4.139.771</b>	<b>100</b>	<b>4.853.457</b>	<b>100</b>	<b>4.623.578</b>	<b>100</b>	<b>4.433.800</b>	<b>100</b>
<b>Laju Pertumbuhan</b>		<b>30</b>		<b>-15</b>		<b>5</b>		<b>4</b>		<b>-</b>

Sumber: Data BPS 2011

**B. PROPORSI BELANJA UNTUK LINGKUNGAN TERHADAP TOTAL BELANJA PPKD**

Proporsi Belanja untuk lingkungan terhadap total belanja menunjukkan itikad baik dari PPKD terhadap tanggung jawab socialnya, utamanya terhadap lingkungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Proporsi anggaran belanja untuk pengelolaan lingkungan dan revitalisasi lingkungan terhadap pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang erat, dan menunjukkan bahwa semakin besar PAD maka akan semakin besar jumlah anggaran belanja untuk lingkungan. Pemetaan terhadap rasio ini menunjukkan kota Surakarta sebagai kota yang paling peduli terhadap pelaksanaan *Green Accounting* dengan rasio terbesar, dan di ikuti kota Semarang
- b. Proporsi anggaran belanja untuk lingkungan terhadap total anggaran belanja, menunjukkan bahwa Kota Surakarta dan dan Kota Semarang tetap menempati urutan pertama dan kedua atas kepedulian terhadap lingkungan.

#### 2. SARAN

Keterbatasan penelitian ini adalah analisis terhadap seluruh PPKD belum dilakukan secara meneluruh, sehingga untuk penelitian yang akan datang diharapkan analisis dilakukan untuk seluruh PPKD, tidak hanya pada PPKD yang menempati kepedulian yang tertinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ball, A. (2005). "Environmental; accounting and change in UK local government". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 18, No., pp. 46-373.
- Bebbington, J. (1997). "Engagement, education, and sustainability". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Volume 10. No 3., pp. 365-381.
- Belkaoui, A. R. and Picur, R.D. (1991). "Cultural determinism and the perception of accounting concepts". *The International Journal of Accounting.*, 26: 118-130.
- Bragdon, P., and B. Donavan. (1990). "Voters' concerns are turning the political agenda green". *Congressional Quarterly* (January 20): 186-187. Cooper, C. (1992).
- "The non and nom of accounting for (m)other nature". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 5 No. 3, pp. 16-39.
- Choi, J.S. (1999). "An investigation of the initial voluntary environmental disclosures made in Korean semi-annual financial report". *Pacific Accounting Review*. Palmerston North, June, Vol.11, Iss. 1; pp. 73.
- Day, M. M. (1995). "Ethics of teaching critical; feminism on the wings of desire". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Volume 8. No 3, pp. 97-112.
- McHugh, J. (2008). "Accountants have key role in sustainability". *Public Finance*; Dec 14, Academic Research
- Library.Raar, J. (2002). "Environmental initiatives:Towards triple-bottom line reporting". *Corporate Communications*. Bradford: Vol.7, Iss. 3; pg. 169, 15 pgs.
- Harahap, S.S. (2002). *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tilt, C.A. (2001). "The content and disclosure of Australia corporate environmental policies". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 14 Iss. 2, pp. 190.
- Mehenna, Y. and Vernon P. D., (2004). "Environmental Accounting: An Essential Component Of Business Strategy". *Business Strategy and the Environment*. Bus. Strat. Env. 13, 65-77.

LAMPIRAN 1. BIAYA BELANJA LINGKUNGAN DAN TOTAL ANGGARAN  
TAHUN 2011

NO	PPKD	TOTAL ANGGARAN	ANGG. BELANJA LINGKUNGAN
1	Kab. Banjarnegara	1.025.500	3.863
2	Kab. Banyumas	1.531.621	25.330
3	Kab. Batang	768.577	13.129
4	Kab. Biora	1.024.630	2.829
5	Kab. Boyolali	1.103.339	4.529
6	Kab. Brebes	1.428.603	6.688
7	Kab. Cilacap	1.354.900	31.372
8	Kab. Demak	1.040.197	3.860
9	Kab. Grobogan	1.152.682	4.495
10	Kab. Jepara	1.033.453	7.670
11	Kab. Karanganyar	901.207	11.757
12	Kab. Kebumen	1.154.243	5.324
13	Kab. Kendal	1.016.191	2.671
14	Kab. Klaten	1.299.874	15.400
15	Kab. Kudus	971.632	20.645
16	Kab. Magelang	1.169.089	4.227
17	Kab. Pati	1.169.111	4.579
18	Kab. Pekalongan	898.873	2.892
19	Kab. Pemasang	990.698	5.334
20	Kab. Purbalingga	893.007	5.999
21	Kab. Purworejo	945.182	2.595
22	Kab. Rembang	800.888	4.042
23	Kab. Semarang	942.876	18.247
24	Kab. Sragen	1.044.565	11.100
25	Kab. Sukoharjo	919.539	3.610
26	Kab. Tegal	1.129.573	5.208
27	Kab. Temanggung	726.785	5.415
28	Kab. Wonogiri	1.118.484	8.002
29	Kab. Wonosobo	893.769	6.234
30	Kota Pekalongan	474.695	7.282
31	Kota Salatiga	477.423	4.166
32	Kota Semarang	2.021.102	83.744
33	Kota Surakarta	1.069.115	57.810
34	Kota Tegal	518.175	8.147



APBD TAHUN 2011  
KLASIFIKASI FUNGSI

(Rupiah)

No	Kode Daerah	Daerah	FUNGSI					
			Ekonomi	Kesehatan	Ketertiban dan Ketentraman	Lingkungan Hidup	Pariwisata dan Budaya	Pelayanan Umum
174	1100	Prop. Jawa Tengah	676.044.050.000,00	752.824.990.000,00	33.817.439.000,00	22.549.871.000,00	46.842.732.000,00	3.510.508.548.000,00
175	1101	Kab. Banjarnegara	55.377.576.000,00	100.037.414.000,00	5.863.433.000,00	3.863.116.000,00	5.903.102.000,00	154.061.211.000,00
176	1102	Kab. Banyumas	89.079.930.501,00	193.369.170.679,00	6.775.305.003,00	25.330.172.327,00	2.436.100.000,00	257.155.103.944,00
177	1103	Kab. Batang	53.063.072.641,00	88.247.055.675,00	4.664.134.734,00	13.129.017.852,00	3.100.094.927,00	156.860.908.337,99
178	1104	Kab. Blora	74.724.868.000,00	92.511.381.000,00	6.538.261.000,00	2.829.480.000,00		194.036.313.000,00
179	1105	Kab. Boyolali	65.856.703.425,00	124.546.762.000,00	6.320.218.600,00	4.529.207.500,00	5.343.334.000,00	201.119.881.425,00
180	1106	Kab. Brebes	72.158.881.000,00	133.684.415.000,00	4.976.264.000,00	6.688.258.000,00	7.033.241.000,00	319.812.316.000,00
181	1107	Kab. Cilacap	71.650.067.000,00	169.416.115.000,00	16.617.235.000,00	31.372.197.000,00	5.650.434.000,00	330.127.880.000,00
182	1108	Kab. Demak	58.580.139.000,00	89.082.436.000,00	6.548.238.000,00	3.859.683.000,00	3.215.814.000,00	216.706.023.000,00
183	1109	Kab. Grobogan	62.648.506.642,00	109.203.427.164,00	7.230.351.524,00	4.495.495.177,00	780.000.000,00	238.587.983.062,00
184	1110	Kab. Jepara	76.561.547.000,00	121.076.988.000,00	6.082.381.000,00	7.670.100.000,00	4.390.288.000,00	242.288.282.000,00
185	1111	Kab. Karanganyar	56.811.380.950,00	84.310.943.000,00	5.351.291.100,00	11.756.603.000,00	4.519.071.000,00	192.071.338.200,00
186	1112	Kab. Kebumen	58.105.013.000,00	109.605.211.000,00	5.523.660.000,00	5.323.989.000,00	3.946.909.000,00	195.117.427.000,00
187	1113	Kab. Kendal	67.398.544.061,00	116.972.049.288,00	6.195.332.745,00	2.671.426.536,00	4.433.753.088,00	188.509.780.104,00
188	1114	Kab. Klaten	54.535.011.000,00	76.321.698.000,00	6.127.191.000,00	15.399.823.000,00	4.614.065.000,00	216.415.154.000,00
189	1115	Kab. Kudus	96.383.613.000,00	137.906.082.000,00	9.364.979.000,00	20.645.271.000,00	5.244.119.000,00	210.388.340.000,00
190	1116	Kab. Magelang	54.359.105.994,00	110.150.565.000,00	3.735.283.000,00	4.226.920.000,00	5.941.162.000,00	253.150.358.816,00
191	1117	Kab. Pati	76.258.854.000,00	173.488.606.000,00	9.097.714.000,00	4.578.642.000,00	3.163.578.000,00	242.249.405.300,00
192	1118	Kab. Pekalongan	40.538.810.000,00	120.361.017.000,00	9.174.536.000,00	2.891.791.000,00		203.173.749.100,00
193	1119	Kab. Pematang	66.529.957.000,00	95.501.031.000,00	6.588.124.000,00	5.334.047.000,00	5.596.924.750,00	201.912.781.250,00
194	1120	Kab. Purbalingga	44.114.213.000,00	115.564.024.000,00	4.484.197.000,00	5.999.367.000,00	2.708.529.000,00	163.223.619.000,00
195	1121	Kab. Purworejo	63.025.631.885,00	103.549.215.965,00	5.029.631.500,00	2.595.376.950,00	688.597.100,00	160.729.331.584,00
196	1122	Kab. Rembang	64.882.181.000,00	105.620.884.000,00	5.028.963.000,00	4.042.463.000,00	3.549.622.000,00	173.452.888.000,00
197	1123	Kab. Semarang	80.455.576.000,00	123.655.525.000,00	6.146.981.000,00	18.246.898.000,00	5.334.281.000,00	194.284.424.000,00
198	1124	Kab. Sragen	76.092.244.000,00	117.746.493.000,00	6.770.432.000,00	11.100.334.000,00	3.272.027.000,00	187.283.446.000,00
199	1125	Kab. Sukoharjo	49.469.894.000,00	98.241.949.000,00	7.978.293.000,00	3.609.873.000,00		172.437.524.000,00
200	1126	Kab. Tegal	45.081.072.000,00	122.417.678.000,00	5.582.464.000,00	5.208.130.000,00	4.673.580.000,00	205.123.442.000,00
201	1127	Kab. Temanggung	49.524.800.400,00	83.959.416.700,00	4.647.234.800,00	5.415.497.700,00	2.446.412.900,00	210.815.354.300,00

Pendidikan	Perlindungan Sosial	Perumahan dan Fasilitas Umum
307.026.510.000,00	167.398.632.000,00	544.736.926.000,00
585.090.426.000,00	2.848.267.000,00	72.455.172.000,00
841.648.895.144,00	6.663.928.621,00	109.132.683.664,00
372.039.268.529,00	7.112.974.118,00	40.360.568.137,00
562.543.378.000,00	3.879.862.000,00	87.566.734.000,00
624.410.728.000,00	4.818.861.625,00	66.388.495.425,00
750.916.102.000,00	9.719.202.000,00	123.614.256.000,00
615.547.905.000,00	12.716.961.000,00	101.800.984.000,00
496.987.600.000,00	9.722.348.000,00	145.494.540.000,00
639.148.330.846,00	16.569.887.586,00	74.018.406.999,00
468.139.328.000,00	14.414.473.000,00	92.832.730.000,00
502.938.767.000,00	9.929.633.750,00	33.318.074.000,00
707.765.549.000,00	3.488.211.000,00	65.366.640.000,00
504.170.875.346,00	17.937.118.131,00	108.001.749.295,00
834.955.120.000,00	14.817.798.000,00	76.688.311.000,00
390.587.720.000,00	5.571.053.000,00	95.540.767.000,00
647.635.541.630,00	14.128.736.000,00	75.720.887.000,00
577.163.384.000,00	4.667.504.700,00	78.443.620.000,00
459.797.740.900,00	15.793.586.000,00	47.142.032.000,00
540.925.994.000,00	7.600.605.000,00	60.708.856.000,00
495.613.406.000,00	4.112.381.000,00	57.187.265.000,00
548.451.931.738,00	14.198.530.154,00	46.913.808.285,00
356.466.198.000,00	3.440.308.000,00	84.404.615.200,00
437.773.916.000,00	9.070.733.000,00	67.907.768.000,00
583.058.217.000,00	6.190.497.000,00	53.051.339.000,00
515.132.055.000,00	13.264.557.000,00	59.404.555.000,00
624.292.499.000,00	17.336.368.000,00	99.858.096.000,00
334.887.352.650,00	5.154.421.600,00	29.932.774.900,00

202	1128	Kab. Wonogiri	72.195.359.000,00	101.139.809.000,00	5.327.615.000,00	8.002.102.000,00	5.202.922.000,00	123.513.731.050,00
203	1129	Kab. Wonosobo	61.228.503.615,00	89.959.450.800,00	4.534.207.000,00	5.234.302.000,00	3.466.411.750,00	170.456.069.353,00
204	1131	Kota Pekalongan	45.871.136.100,00	58.842.209.500,00	4.660.503.800,00	7.281.695.000,00	3.019.786.000,00	129.770.587.600,00
205	1132	Kota Salatiga	27.860.229.200,00	75.195.024.000,00	7.931.673.000,00	4.166.320.000,00	14.696.521.000,00	103.545.451.000,00
206	1133	Kota Semarang	151.288.281.950,00	#####	#####	83.743.527.600,00	11.468.106.500,00	623.866.855.528,00
207	1134	Kota Surakarta	109.265.290.000,00	#####	#####	57.810.195.500,00	2.201.949.000,00	223.359.320.500,00
208	1135	Kota Tegal	38.969.564.000,00	#####	8.051.845.000,00	8.146.535.000,00		132.960.056.000,00

6/9,429,994,750,00  
434.066.154.450,00  
169.353.768.100,00  
177.438.788.000,00  
667.638.604.000,00  
487.615.967.000,00  
163.593.601.000,00

15.050.031.000,00  
5.221.194.000,00  
8.533.038.250,00  
10.898.184.000,00  
51.935.373.800,00  
7.712.222.000,00  
8.777.649.000,00

42.601.030.400,00  
118.602.654.000,00  
47.362.605.900,00  
70.387.253.476,00  
243.646.062.900,00  
49.607.003.000,00  
45.402.589.000,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4		
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>293.826.726.298</b>	<b>314.653.496.600</b>	<b>20.826.770.302</b>	<b>7,09</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	155.760.000.000	162.510.000.000	6.750.000.000	4,33
1.1.1	Pajak Daerah	82.057.313.000	83.247.627.000	1.190.314.000	1,45
1.1.2	Retribusi Daerah	5.338.489.338	5.338.489.000	(338)	(0,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.670.923.960	63.557.380.600	12.886.456.640	25,43
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	<b>890.476.695.702</b>	<b>947.735.972.000</b>	<b>57.259.276.298</b>	<b>6,43</b>
1.2	Dana Perimbangan	219.440.723.702	276.700.000.000	57.259.276.298	26,09
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	557.500.000	557.500.000	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	640.186.272.000	640.186.272.000	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000	30.292.200.000	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<b>193.766.303.000</b>	<b>332.273.106.400</b>	<b>138.506.803.400</b>	<b>71,48</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya	160.573.905.000	149.904.264.000	(10.669.641.000)	(6,64)
1.3.4	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan dana penguatan infrastruktur dan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan tunj. Profesi Guru PNSD	-	27.930.500.000	27.930.500.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	33.192.398.000	86.395.049.400	86.395.049.400	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.378.069.725.000</b>	<b>1.594.662.575.000</b>	<b>216.592.850.000</b>	<b>15,72</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>978.889.130.000</b>	<b>1.056.178.207.618</b>	<b>77.289.077.618</b>	<b>7,90</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	824.129.811.000	905.852.577.618	81.722.766.618	9,92
2.1.1	Belanja Pegawai	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	49.171.770.000	36.155.450.000	(13.016.320.000)	-
2.1.4	Belanja Hibah	92.558.112.000	110.801.612.000	18.243.500.000	19,71
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi Kabupaten/Kota dan Perm Desa	788.568.000	788.568.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keu.Kpd Prov /Kabupaten/Kota dan Perm Belanja Tidak Terduga	11.160.869.000	1.500.000.000	(9.660.869.000)	(86,56)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	<b>700.182.461.000</b>	<b>842.699.303.000</b>	<b>142.516.842.000</b>	<b>20,35</b>
2.2	Belanja Langsung	111.299.222.000	113.076.690.036	1.777.468.036	1,60
2.2.1	Belanja pegawai	393.926.027.000	423.396.196.962	29.470.169.962	7,48
2.2.2	Belanja barang dan jasa	194.957.212.000	306.226.416.000	111.269.204.000	57,13
2.2.3	Belanja modal	-	-	-	-

SURPLUS/(DEFISIT)		(301.001.866.000)	(304.214.935.618)	(3.213.069.618)	1,04
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA Th Anggaran sebelumnya	309.901.866.000	313.114.935.618	3.213.069.618	1,04
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali	-	-	-	-
3.1.6	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
	Penerimaan Plutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pen. Pembiayaan</b>	<b>309.901.866.000</b>	<b>313.114.935.618</b>	<b>3.213.069.618</b>	<b>1,04</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Bank)	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
3.2.3	Penyertaan Modal (PDAM)	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-
	<b>Jumlah Pengel.</b>	<b>8.900.000.000</b>	<b>8.900.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>301.001.866.000</b>	<b>304.214.935.618</b>	<b>3.213.069.618</b>	<b>1,07</b>
<b>3.3</b>	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>	-	-	-	-

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>120.183.277.000</b>	<b>114.429.357.815</b>	<b>(5.753.919.185)</b>	<b>(4,79)</b>
1.1.1	Pajak Daerah	53.512.500.000	54.423.668.000	911.168.000	1,70
1.1.2	Retribusi Daerah	46.903.995.000	42.756.415.000	(4.147.580.000)	(8,84)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.298.557.000	4.984.196.000	1.685.639.000	51,10
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	16.468.225.000	12.265.078.815	(4.203.146.185)	(25,52)
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>531.857.459.000</b>	<b>614.099.922.000</b>	<b>82.242.463.000</b>	<b>15,46</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	74.490.132.000	85.533.389.000	11.043.257.000	14,83
1.2.2	Dana Alokasi Umum	428.248.927.000	499.448.133.000	71.199.206.000	16,63
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	29.118.400.000	29.118.400.000	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>176.594.220.000</b>	<b>141.689.779.000</b>	<b>(34.904.441.000)</b>	<b>(19,77)</b>
1.3.1	Hibah	2.200.000.000	5.000.000.000	2.800.000.000	127,27
1.3.2	Dana Darurat	47.394.013.000	53.429.000.000	6.034.987.000	12,73
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya	103.885.178.000	59.570.550.000	(44.314.628.000)	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	23.115.029.000	23.690.229.000	575.200.000	2,49
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>828.634.956.000</b>	<b>870.219.058.815</b>	<b>41.584.102.815</b>	<b>5,02</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>561.160.223.000</b>	<b>620.168.235.000</b>	<b>59.008.012.000</b>	<b>10,52</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	448.454.807.000	535.120.687.000	86.665.880.000	19,33
2.1.2	Belanja Bunga	2.503.270.000	2.404.486.000	(98.784.000)	(3,95)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	92.938.130.000	64.273.017.000	(28.665.113.000)	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.573.500.000	6.249.361.000	675.861.000	12,13
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pem Desa	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keu.Kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pem Desa	10.690.516.000	10.690.516.000	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.430.168.000	430.168.000	43,02
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>777.000.000.000</b>	<b>764.066.000.000</b>	<b>(12.934.000.000)</b>	<b>(1,67)</b>

2.2.1	Belanja pegawai	28.646.067.000	30.631.914.000	1.985.847.000	5,91
2.2.2	Belanja barang dan jasa	110.249.182.000	127.691.802.000	17.442.620.000	15,82
2.2.3	Belanja modal	138.197.639.000	106.543.091.000	(31.654.548.000)	(22,91)
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>838.253.111.000</b>	<b>885.035.042.000</b>	<b>46.781.931.000</b>	<b>5,58</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(9.618.155.000)</b>	<b>(14.815.983.185)</b>	<b>(5.197.828.185)</b>	<b>54,04</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	SILPA Th Anggaran sebelumnya			1.956.619.185	10,87
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	18.000.000.000			-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		1.515.136.000	1.515.136.000	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pinjaman Bergulir	50.000.000	3.288.605.000	3.238.605.000	-
3.1.7	Penerimaan dari pihak ketiga	700.000.000	700.000.000		-
	<b>Jumlah Pen. Pembiayaan</b>	<b>18.750.000.000</b>	<b>25.460.360.185</b>	<b>6.710.360.185</b>	<b>35,79</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	300,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6.939.845.000	6.952.377.000	12.532.000	0,18
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	992.000.000	992.000.000		-
3.2.5	<b>Pengembalian Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Pengel. Pembiayaan</b>	<b>9.131.845.000</b>	<b>10.644.377.000</b>	<b>1.512.532.000</b>	<b>16,56</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>9.618.155.000</b>	<b>14.815.983.185</b>	<b>5.197.828.185</b>	<b>54,04</b>
<b>3.3</b>	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>				



2.2.2 Belanja barang dan jasa		4.952.000.000	28.844.282.000	4.261.397.000	17,33
2.2.3 Belanja modal		126.187.458.974	152.591.021.500	26.403.562.526	20,92
		66.394.384.200	163.856.006.490	97.461.622.290	146,79
Jumlah Belanja		828.122.146.135	976.484.321.507	148.362.175.372	17,92
SURPLUS/(DEFISIT)		(30.203.589.000)	(65.053.534.435)	(34.849.945.435)	115,38
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	SILPA Th Anggaran sebelumnya	30.977.136.850	68.115.082.285	37.137.945.435	119,89
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	# DIV/0!
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pen. Pembiayaan</b>	<b>36.977.136.850</b>	<b>74.115.082.285</b>	<b>37.137.945.435</b>	<b>100,43</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	500.000.000	2.788.000.000	2.288.000.000	457,60
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	273.547.850	273.547.850	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
3.2.5	Pengembalian kembali Pinjaman	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
	<b>Jumlah Pengel. Pembiayaan</b>	<b>6.773.547.850</b>	<b>9.061.547.850</b>	<b>2.288.000.000</b>	<b>33,78</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>30.203.589.000</b>	<b>65.053.534.435</b>	<b>34.849.945.435</b>	<b>115,38</b>
<b>3.3</b>	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>	-	-	-	# DIV/0!

RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2009

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>75.773.781.000</b>	<b>84.442.085.137</b>	<b>8.668.304.137</b>	<b>11,44</b>
1.1.1	Pajak Daerah	17.003.000.000	17.917.066.000	914.066.000	5,38
1.1.2	Retribusi Daerah	11.119.985.000	14.788.153.900	3.668.168.900	32,99
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.078.820.000	4.363.057.237	284.237.237	6,97
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	43.571.976.000	47.373.808.000	3.801.832.000	8,73
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>638.706.214.041</b>	<b>638.856.214.041</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0,02</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	59.484.628.041	59.634.628.041	150.000.000	0,25
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.676.886.000	520.676.886.000	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	58.544.700.000	58.544.700.000	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>83.438.562.094</b>	<b>188.132.487.894</b>	<b>104.693.925.800</b>	<b>125,47</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	#DIV/0!
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya	36.467.927.094	36.467.927.094	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16.842.567.000	72.450.492.800	55.607.925.800	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	30.128.068.000	79.214.068.000	49.086.000.000	162,92
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>797.913.557.135</b>	<b>911.430.787.072</b>	<b>113.517.229.937</b>	<b>14,23</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>610.957.417.311</b>	<b>631.193.010.867</b>	<b>20.235.593.556</b>	<b>3,31</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	483.490.473.411	535.121.566.753	51.631.093.342	10,68
2.1.2	Belanja Bunga	175.000.000	175.000.000	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	51.386.654.114	16.189.254.114	(35.197.400.000)	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	33.670.090.000	40.044.190.000	6.374.100.000	18,93
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem Desa	-	-	-	#DIV/0!
2.1.7	Belanja Bantuan Keu.Kpd Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pem Desa	38.868.000.000	38.743.000.000	(125.000.000)	(0,32)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.367.199.786	920.000.000	(2.447.199.786)	(72,68)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>427.311.654.923,00</b>	<b>447.032.951.000,00</b>	<b>19.721.296.077,00</b>	<b>4,62</b>	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	275.562.250.000,00	286.576.562.000,00	11.014.312.000,00	4,00	
1.1.1	Pajak Daerah	84.253.796.954,00	87.999.459.000,00	3.745.662.046,00	4,45	
1.1.2	Retribusi Daerah	6.005.800.505,00	6.005.800.000,00	0,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelabalan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	61.489.807.464,00	66.451.130.000,00	4.961.322.536,00	8,07	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	953.040.271.000,00	997.281.109.000,00	44.240.838.000,00	4,64	
1.2	Dana Perimbangan	188.121.304.000,00	232.621.304.000,00	44.500.000.000,00	23,65	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	557.500.000,00	557.500.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	715.959.967.000,00	715.700.805.000,00	-259.162.000,00	-0,04	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.401.500.000,00	48.401.500.000,00	0,00	0,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	333.229.308.077,00	548.379.833.000,00	215.150.524.923,00	64,57	
1.3.1	Hibah			0,00	# DIV/0!	
1.3.2	Dana Darurat			0,00	# DIV/0!	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya	197.214.942.077,00	221.149.709.000,00	23.934.766.923,00	12,14	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	43.014.241.000,00	88.558.675.000,00	45.544.434.000,00	105,88	
1.3.6	Dana Otonomi Khusus			0,00		
1.3.7	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi			0,00		
1.3.8	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah :			0,00		
	DPPID		10.922.982.000,00	10.922.982.000,00		
	Tambahan Pengh. bagi Guru PNSD Tunj. Profesi Guru PNSD pd Daerah		11.396.250.000,00	11.396.250.000,00		
	Dana Bantuan Operasional Sekolah	93.000.125.000,00	123.352.092.000,00	123.352.092.000,00		
			93.000.125.000,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.713.581.234.000,00</b>	<b>1.992.693.893.000,00</b>	<b>279.112.659.000,00</b>	<b>16,29</b>	

<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>							
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.052.506.328.036,00</b>	<b>1.193.449.007.000,00</b>	<b>140.942.678.964,00</b>	<b>13,39</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai	883.510.708.236,00	1.023.178.319.000,00	139.667.610.764,00	15,81			
2.1.2	Belanja Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00			
2.1.3	Belanja Subsidi				#DIV/0!			
2.1.4	Belanja Hibah	50.668.525.000,00	52.120.625.000,00	1.452.100.000,00	2,87			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	114.967.804.000,00	114.781.495.000,00	0,00	-0,16			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem Desa			0,00	#DIV/0!			
2.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pem Desa	779.290.800,00	788.568.000,00	9.277.200,00	#DIV/0!			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1,19			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>968.595.243.000,00</b>	<b>1.066.648.658.000,00</b>	<b>98.053.415.000,00</b>	<b>10,12</b>			
2.2.1	Belanja pegawai	124.464.715.048,00	142.332.362.493,00	17.867.647.445,00	14,36			
2.2.2	Belanja barang dan jasa	505.881.816.203,00	511.950.960.112,00	6.069.143.909,00	1,20			
2.2.3	Belanja modal	338.248.711.749,00	412.365.335.395,00	74.116.623.646,00	21,91			
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.021.101.571.036,00</b>	<b>2.260.097.665.000,00</b>	<b>238.996.093.964,00</b>	<b>11,83</b>			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			<b>40.116.565.036,00</b>	<b>-13,05</b>			
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>							
3.1.1	SILPA Th Anggaran sebelumnya	207.004.554.400,00	195.198.552.000,00	0,00	-5,70			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			0,00	#DIV/0!			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00	#DIV/0!			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	103.415.782.636,00	77.105.220.000,00	0,00	-25,44			
3.1.5	Penerimaan kembali			0,00	#DIV/0!			
	Pemberian Pinjaman			0,00	#DIV/0!			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			0,00	#DIV/0!			
3,17	Penerimaan dari Pihak Ketiga			0,00	#DIV/0!			
3,18	Penerimaan/Penarikan Deposito			0,00	#DIV/0!			
	<b>Jumlah Pen. Pembiayaan</b>	<b>310.420.337.036,00</b>	<b>272.303.772.000,00</b>		<b>-12,28</b>			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				<b>#DIV/0!</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
	Perusda Percetakan	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3	Penyertaan Modal (Investasi)	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dana Berguir UKM, LKM & Koperasi	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00			
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00			
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah			0,00	#DIV/0!			

3.2.6	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga	2.900.000.000,00 307.520.337.036,00	4.900.000.000,00 267.403.772.000,00	0,00 2.000.000.000,00	68,97 -13,05
3.3	SILPA Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>159.164.782.000,00</b>	<b>176.176.060.000,00</b>	<b>17.011.278.000,00</b>	<b>10,69</b>
1.1.1	Pajak Daerah	90.879.228.000,00	102.241.123.000,00	11.361.895.000,00	12,50
1.1.2	Retribusi Daerah	49.035.008.000,00	50.291.841.000,00	1.256.833.000,00	2,56
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.784.196.000,00	5.834.196.000,00	50.000.000,00	0,86
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	13.466.350.000,00	17.808.900.000,00	4.342.550.000,00	32,25
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>642.726.604.000,00</b>	<b>659.191.166.000,00</b>	<b>16.464.562.000,00</b>	<b>2,56</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	62.541.201.000,00	63.816.197.000,00	1.274.996.000,00	2,04
1.2.2	Dana Alokasi Umum	545.289.803.000,00	560.479.369.000,00	15.189.566.000,00	2,79
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.895.600.000,00	34.895.600.000,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>201.732.123.000,00</b>	<b>169.891.312.000,00</b>	<b>-15,78</b>	
1.3.1	Hibah	6.810.000.000,00	6.200.000.000,00	-8,96	
1.3.2	Dana Darurat			0,00	#DIV/0!
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya	56.150.157.000,00	56.150.938.000,00	781.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	20.073.416.000,00	23.511.256.000,00	3.437.840.000,00	17,13
1.3.6	Dana Otonomi Khusus	118.698.550.000,00	84.029.118.000,00		
1.3.7	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.003.623.509.000,00</b>	<b>1.005.258.538.000,00</b>	<b>1.635.029.000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>653.331.631.000,00</b>	<b>696.649.666.600,00</b>	<b>43.318.035.600,00</b>	<b>6,63</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	577.109.218.000,00	601.702.859.000,00	24.593.641.000,00	4,26
2.1.2	Belanja Bunga	2.600.000.000,00	1.918.785.000,00	-26,20	
2.1.3	Belanja Subsidi			0,00	#DIV/0!
2.1.4	Belanja Hibah	65.935.497.000,00	85.451.911.600,00	19.516.414.600,00	29,60
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.686.916.000,00	6.041.400.000,00	-9,65	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/			0,00	#DIV/0!

2.1.7	Kabupaten/Kota dan Pem Desa Belanja Bantuan Keu.Kpd Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pem Desa		690.516.000,00	690.516.000,00	#DIV/0!
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	844.195.000,00		#DIV/0!
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>415.783.042.000,00</b>	<b>357.263.200.869,00</b>	<b>-14,07</b>	
2.2.1	Belanja pegawai	30.964.696.000,00	38.158.169.000,00	7.193.473.000,00	23,23
2.2.2	Belanja barang dan jasa	138.896.353.000,00	166.614.804.869,00	27.718.451.869,00	19,96
2.2.3	Belanja modal	245.921.993.000,00	152.490.227.000,00		-37,99
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.069.114.673.000,00</b>	<b>1.053.912.867.469,00</b>	<b>16.836.834.531,00</b>	<b>-1,42</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				<b>-25,71</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	SILPA Th Anggaran sebelumnya	32.107.300.000,00	43.959.738.469,00	11.852.438.469,00	36,92
3.1.2	Pencapaian Dana Cadangan				#DIV/0!
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				#DIV/0!
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	41.000.000.000,00	8.100.000.000,00		-80,24
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	422.000.000,00	515.265.000,00	93.265.000,00	22,10
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				#DIV/0!
3.1.7	Penerimaan dari Pihak Ketiga	700.000.000,00	3.947.221.862,00	3.247.221.862,00	
3.1.8	Penerimaan/Peñarikan Deposito		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	#DIV/0!
	<b>Jumlah Per. Pembiayaan</b>	<b>74.229.300.000,00</b>	<b>59.522.225.331,00</b>		<b>-19,81</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00		#DIV/0!
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	3.161.000.000,00	3.151.000.000,00		0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	4.215.136.000,00	3.097.674.000,00		-26,51
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	662.000.000,00	662.000.000,00		0,00
3.2.5	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga	700.000.000,00	3.947.221.862,00	3.247.221.862,00	
	<b>Jumlah Pengel. Pembiayaan</b>	<b>8.738.136.000,00</b>	<b>10.867.895.862,00</b>	<b>2.129.759.862,00</b>	<b>24,37</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>65.491.164.000,00</b>	<b>48.654.339.469,00</b>		<b>-25,71</b>
<b>3.3</b>	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR : 25 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 7 OKTOBER 2011

RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	85.677.120.700,00	88.115.980.943,00	2.438.860.243,00	2,85
1.1.1	Pajak Daerah	20.955.150.000,00	22.760.150.000,00	1.805.000.000,00	8,61
1.1.2	Retribusi Daerah	14.065.958.000,00	15.205.142.700,00	1.139.184.700,00	8,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.444.869.500,00	3.165.029.114,00	(1.279.840.386,00)	(28,79)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	46.211.143.200,00	46.985.659.129,00	774.515.929,00	1,68
1.2	Dana Perimbangan	698.409.094.622,00	702.371.560.520,00	3.962.465.898,00	0,57
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	61.515.905.622,00	65.790.094.520,00	4.274.188.898,00	6,95
1.2.2	Dana Alokasi Umum	569.535.389.000,00	569.223.666.000,00	(311.723.000,00)	(0,05)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	67.357.800.000,00	67.357.800.000,00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	174.896.559.800,00	334.274.954.360,00	159.378.394.560,00	91,13
1.3.1	Hibah	-	-	-	# DIV/0!
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	# DIV/0!
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya	36.467.927.000,00	36.467.927.000,00	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54.658.267.800,00	182.230.162.360,00	127.571.894.560,00	233,40
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	83.770.365.000,00	115.576.865.000,00	31.806.500.000,00	37,97
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>958.982.775.122,00</b>	<b>1.124.762.495.823,00</b>	<b>165.779.720.701,00</b>	<b>17,29</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	Belanja Tidak Langsung	610.427.594.390,00	640.426.530.209,00	29.998.935.819,00	4,91
2.1.1	Belanja Pegawai	559.610.754.390,00	582.456.522.209,00	22.845.767.819,00	4,08
2.1.2	Belanja Bunga	175.000.000,00	165.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,71)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	# DIV/0!



2.1.4	Belanja Hibah	3.639.000.000,00	11.400.358.000,00	7.761.358.000,00	213,28
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14.973.840.000,00	15.953.840.000,00	980.000.000,00	6,54
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem Desa				#DIV/0!
2.1.7	Belanja Bantuan Keu.Kpd Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem Desa	28.729.000.000,00	28.529.000.000,00	(200.000.000,00)	#DIV/0!
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.300.000.000,00	1.921.810.000,00	(1.378.190.000,00)	(0,70)
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>405.763.034.214,00</b>	<b>540.227.044.613,00</b>	<b>134.464.010.399,00</b>	#DIV/0!
2.2.1	Belanja pegawai	26.946.806.900,00	37.871.948.900,00	10.925.142.000,00	(41,76)
2.2.2	Belanja barang dan jasa	197.038.181.617,00	259.369.548.516,00	62.331.366.899,00	33,14
2.2.3	Belanja modal	181.778.045.697,00	242.985.547.197,00	61.207.501.500,00	40,54
					31,63
					33,67
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.016.190.628.604,00</b>	<b>1.180.653.574.822,00</b>	<b>164.462.946.218,00</b>	16,18
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(57.207.853.482,00)</b>	<b>(55.891.078.999,00)</b>	<b>1.316.774.483,00</b>	(2,30)
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	SILPA Th Anggaran sebelumnya	59.333.368.332,00	58.695.143.849,00	(638.224.483,00)	(1,08)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	#DIV/0!
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	(100,00)
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	(100,00)
3.1.7	Penerimaan Piutang Daerah	148.033.000,00	148.033.000,00	-	-
	<b>Jumlah Pen. Pembiayaan</b>	<b>65.481.401.332,00</b>	<b>58.843.176.849,00</b>	<b>(6.638.224.483,00)</b>	(10,14)
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	273.547.850,00	183.547.850,00	(90.000.000,00)	(32,90)
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.4	Pengembalian Kembali Pinj Daerah	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.5	Pengemb. Kelebihan Dana Transfer THP Guru		400.500.000,00		
3.2.6	Pembayaran Kekurangan Pajak Penghasilan		3.000.000,00		
3.2.7	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga		365.050.000,00		
	<b>Jumlah Pengel. Pembiayaan</b>	<b>8.273.547.850,00</b>	<b>2.952.097.850,00</b>	<b>(5.321.450.000,00)</b>	(64,32)
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>57.207.853.482,00</b>	<b>55.891.078.999,00</b>	<b>(1.316.774.483,00)</b>	(2,30)
<b>3.3</b>	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>				#DIV/0!